



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v2i2>

Received: 12 Juli 2024, Revised: 18 Juli 2024, Publish: 30 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Hukum Perdata Internasional terkait Kontrak Asing dan Pemanfaatan Hasil Alam oleh Asing: Analisis terhadap Keterlaksanaan Pasal 33 Ayat 3 dan 4 UUD 1945

Theresye Yoanita Octora¹, Fausta Ari Barata², Heliaantoro Heliaantoro³

¹Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Indonesia, yoanita.oct@gmail.com

²PT.FAB Enterprises Logisindo, Indonesia, austa.untagsby@fab-enterprises.com

³STIH Gunung Jati, Indonesia, toro1940@gmail.com

Corresponding Author: yoanita.oct@gmail.com¹

Abstrak: Tujuan dari artikel diharapkan dapat memberikan panduan yang berguna bagi para pembuat kebijakan, pengambil keputusan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun strategi yang berkelanjutan dan inklusif dalam mengelola sumber daya alam Indonesia. Artikel ini menggunakan kualitatif, dimana memberikan penguatan dari hasil review yang berasal dari literatur-literatur yang ada berkaitan dengan hasil temuan yang ada dalam artikel ini. Setelah literatur di dapatkan maka implementasi dari artikel yang berkaitan dengan memberikan suatu perspektif dari peneliti sebagai hasil penelitian.

Kata Kunci: Hukum Perdata Internasional, Kontrak Asing, Pemanfaatan Hasil Alam, Pasal 22 Ayat 3 dan 4 UUD 1945

PENDAHULUAN

Hukum perdata internasional menjadi landasan penting dalam mengatur kontrak-kontrak asing yang melibatkan pemanfaatan hasil alam oleh pihak asing. Kontrak-kontrak ini sering kali mengatur tentang penggunaan sumber daya alam yang kaya di berbagai negara, yang bisa meliputi mineral, hutan, atau sumber daya alam lainnya (Shuayb *et al.*, 2024). Namun, implementasi dari prinsip-prinsip ini sering kali menghadapi tantangan dalam konteks konstitusi Indonesia, khususnya terkait dengan Pasal 33 Ayat 3 & 4 UUD 1945. Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Hrp and Thalib, 2019). Sementara Ayat 4 dari pasal yang sama menekankan perlunya negara mengatur dan mengawasi pelaksanaan sistem ekonomi nasional, yang berasaskan atas azas kekeluargaan (Wardhana, 2019).

Namun demikian, dalam praktiknya, terdapat ketegangan antara implementasi hukum perdata internasional yang mendorong adanya kepastian hukum bagi pihak asing yang ingin berinvestasi atau menggunakan sumber daya alam di Indonesia, dengan ketentuan konstitusi yang mendorong untuk memprioritaskan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat (Handayani, 2018). Implementasi Pasal 33 Ayat 3 & 4 UUD 1945 dalam konteks pemanfaatan

hasil alam oleh pihak asing memerlukan pendekatan yang hati-hati dan seimbang. Di satu sisi, pemerintah harus memastikan bahwa investasi asing membawa manfaat yang nyata bagi kemakmuran rakyat dan tidak merugikan kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber daya alam (Yuda, 2023). Di sisi lain, perlindungan terhadap kekayaan alam harus dijaga untuk keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masa depan generasi mendatang.

Proses implementasi ini sering kali melibatkan penyusunan regulasi yang memadai, seperti peraturan mengenai tata kelola lingkungan, pembagian manfaat secara adil antara pihak asing dan lokal, serta mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku (Liu, Failler and Liu, 2022). Pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi jangka panjang dari kegiatan ekstraktif terhadap masyarakat lokal, termasuk dalam hal redistribusi manfaat ekonomi dan pengembangan kapasitas lokal (Akram, ul haq and Raza, 2019). Selain itu, harmonisasi antara hukum perdata internasional dan ketentuan konstitusi nasional merupakan tantangan penting yang memerlukan kajian mendalam dan dialog antar-stakeholder yang inklusif. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang cerdas untuk membangun kerangka kerja hukum yang memadai yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pihak asing, tetapi juga memperkuat kedaulatan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan Indonesia (Destyanto *et al.*, 2022; Husein *et al.*, 2023).

Masalah utama yang muncul dalam implementasi prinsip-prinsip Pasal 33 Ayat 3 & 4 UUD 1945 terkait dengan pemanfaatan hasil alam oleh pihak asing antara lain pihak asing sering menghadapi ketidakpastian terkait dengan regulasi yang berubah-ubah atau penafsiran yang berbeda-beda dari hukum yang ada. Hal ini dapat menghambat investasi jangka panjang dan menciptakan risiko hukum yang tinggi (Safitri and Sumriyah, 2023). Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan sosial, termasuk pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tantangan timbul ketika kegiatan ekstraktif oleh pihak asing tidak selaras dengan visi pembangunan nasional atau tidak memberikan manfaat yang memadai bagi masyarakat lokal (Yine, 1998). Pemanfaatan hasil alam, terutama dalam sektor ekstraktif, sering kali berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan. Perlindungan lingkungan hidup menjadi penting dalam konteks keberlanjutan, namun kadang-kadang tidak selalu diutamakan dalam praktik ekstraksi oleh pihak asing (Kustandi and Yatimah, 2023).

Distribusi manfaat ekonomi dari kegiatan ekstraktif antara pihak asing dan masyarakat lokal sering kali tidak seimbang. Hal ini dapat menciptakan disparitas ekonomi dan sosial di daerah yang menjadi lokasi eksploitasi sumber daya alam. Tantangan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, serta efektivitas pengawasan terhadap kegiatan pihak asing, sering kali menjadi isu yang kompleks dan memerlukan perbaikan dalam sistem regulasi dan pengawasan (Berliandaldo and Prasetyo, 2022). Pihak asing sering menuntut perlakuan yang setara dengan pihak domestik dalam hal investasi dan akses terhadap pasar. Namun, sejalan dengan prinsip Pasal 33 Ayat 3 & 4 UUD 1945, pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan nasional dan sosial dalam memberikan izin dan regulasi (Fuqoha *et al.*, 2023). Partisipasi dan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam sering kali tidak optimal, meskipun hal ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi komunitas lokal (Safitri, 2023).

Kesenjangan yang ada dalam artikel ini dapat mengeksplorasi sejauh mana ketentuan hukum perdata internasional yang mengatur kontrak-kontrak asing bertentangan atau tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pasal 33 Ayat 3 & 4 UUD 1945. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana harmonisasi atau penyesuaian hukum nasional perlu dilakukan untuk memenuhi tujuan konstitusional yang diinginkan dan bagaimana implementasi prinsip-prinsip Pasal 33 Ayat 3 & 4 UUD 1945 mempengaruhi keberlanjutan lingkungan hidup di daerah-daerah yang menjadi lokasi eksploitasi sumber daya alam. Ini termasuk analisis terhadap praktik pengelolaan lingkungan

oleh pihak asing, dampak terhadap biodiversitas, serta strategi atau kebijakan yang diperlukan untuk memastikan perlindungan lingkungan yang optimal. Sejauh mana partisipasi dan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan hasil alam. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang diimplementasikan memperhitungkan kepentingan serta aspirasi masyarakat setempat.

Tujuan dari artikel diharapkan dapat memberikan panduan yang berguna bagi para pembuat kebijakan, pengambil keputusan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun strategi yang berkelanjutan dan inklusif dalam mengelola sumber daya alam Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah tinjauan pustaka terstruktur. Artikel-artikel ilmiah yang relevan dipilih, diidentifikasi, dan dievaluasi selama proses tinjauan pustaka. Penentuan cakupan studi dilakukan menggunakan kerangka PICO (populasi/permasalahan, intervensi, perbandingan), yang digunakan untuk menetapkan batasan studi. Sejumlah artikel ilmiah relevan dipilih, diidentifikasi, dan ditelaah selama tinjauan pustaka. Cakupan studi ditentukan dengan menggunakan kerangka PICO, yang memberikan skor untuk menetapkan batasan penelitian. Tabel 1 menggambarkan batasan-batasan cakupan penelitian dengan merujuk pada tinjauan pustaka dari beberapa jurnal yang ada. Tabel 2 kemudian memaparkan metrik yang digunakan dari artikel ilmiah, serta menyajikan temuan dalam artikel ini.

Tabel 1. Summary of PICO

Component	Information
Population/problem	Kontrak Asing
Intervetion Comparison	n.a
Pihak Asing	The reinforcement is based on literature that reflects findings from studies conducted by other researchers

Proses penelitian melibatkan merumuskan pertanyaan penelitian, melakukan pencarian literatur, memilih studi untuk ekstraksi data, menilai kriteria kelayakan, dan mengevaluasi kualitas. Artikel ini berfokus pada mengeksplorasi pertanyaan penelitian melalui pencarian literatur di berbagai jurnal internasional. Kajian ini menekankan pentingnya Hukum Perdata Internasional, Kontrak Luar Negeri, Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pasal 22 Ayat 3 dan 4 UUD 1945. Pencarian artikel dilakukan pada Juli 2024, menggunakan pedoman PRISMA (Item Pelaporan Pilihan untuk Tinjauan Sistematis dan Meta-Analisis) untuk pemilihan sumber literatur. Kriteria kelayakan artikel meliputi standar inklusi dan eksklusi khusus: 1) Pencantuman artikel ilmiah yang ditulis dalam bahasa Indonesia, dan 2) Pencantuman literatur yang diterbitkan sebagai artikel ilmiah dalam jurnal, baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Artikel penelitian yang tidak memenuhi kriteria ini dikecualikan, tanpa batasan tahun publikasi. Pembahasan dalam artikel penelitian berfokus pada pentingnya keragaman, kesetaraan, inklusi dengan kinerja karyawan, disajikan dalam gaya tinjauan literatur.

Teks lengkap tidak tersedia; Artikel ini sangat mudah dalam istilah ilmiah. Dalam penyelidikan ini, kriteria tidak diterapkan untuk menyelesaikan prosedur pemilihan sumber. Gambar 1 menggambarkan kumpulan literatur, membandingkan penilaian literatur yang mendukung; Proses sintesis material dilakukan. Langkah terakhir melibatkan penilaian kualitas sintesis data, referensi temuan penelitian dan penambahan data. Tabel matriks fabrikasi mewakili hasil ekstraksi data.

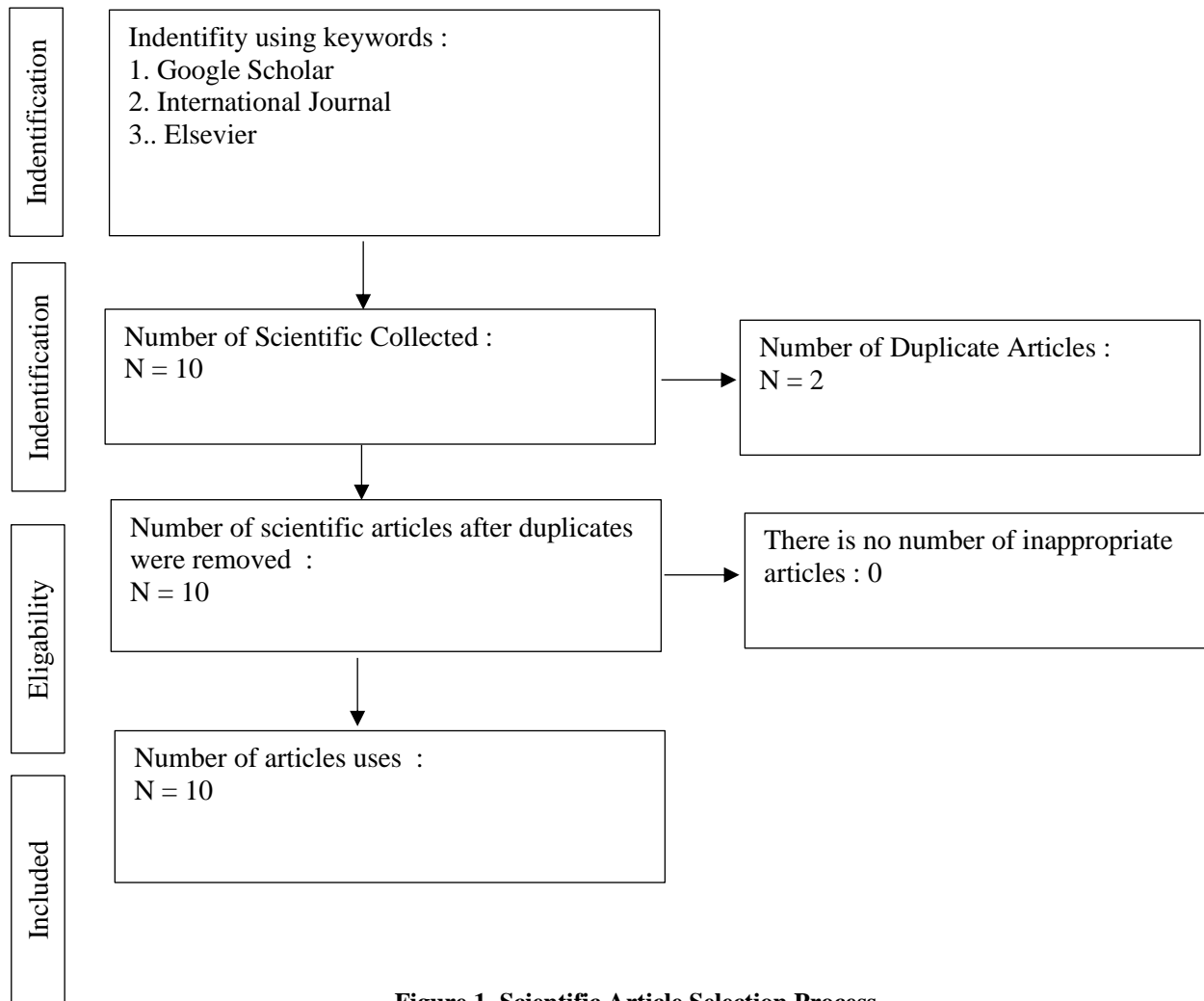


Figure 1. Scientific Article Selection Process

Tabel 2. Uraian Literatur

Number	Article Name	Authors	Journal	Publisher	Findings
1	Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing Melalui Perjanjian Pinjam Nama Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum Dalam Hukum Perdata Internasional	(Hetharie, 2022)(Munim and Schramm, 2018)	BALOBELaw Journal Vol. 2 No. 1, April 2022	Balobe	Perjanjian pinjam nama adalah perjanjian yang dibuat antara seseorang yang menurut hukum tidak dapat menjadi subjek hak-hak tertentu atas tanah (hak milik), dalam hal ini seorang warga negara asing, dan seorang warga negara Indonesia, dengan tujuan agar warga negara asing dapat mengendalikan (memiliki) hak kepemilikan secara de facto secara sah, tetapi secara de jure hak milik tetap berada di bawah nama warga negara Indonesia. Perjanjian pinjam nama ini jelas merupakan bentuk penyelundupan hukum untuk menghindari regulasi yang menetapkan bahwa warga asing tidak memenuhi syarat sebagai subjek pemegang hak kepemilikan tanah di Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1)

					jo. Pasal 21 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hubungan penuh dengan tanah, air, dan ruang, serta secara tegas menegaskan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak milik
2	Segi-Segi Hukum Perdata Internasional Indonesia pada Perjanjian Jual Beli Saham dalam Proses Pengambilalihan Saham atas Perusahaan Indonesia oleh Perusahaan Asing	(Bungsu, 2023)	JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 7, No 3 (2023)	Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala	Salah satu bentuk investasi asing adalah melalui pembelian saham dalam proses pengambilalihan. Akuisisi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau individu untuk mengambil alih saham suatu perusahaan beserta kontrolnya. Pengambilalihan ini umumnya disepakati oleh para pihak melalui pembuatan perjanjian jual beli saham. Pengambilalihan di Indonesia harus mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia
3	Ideologi Dan Konstitusi Ekonomi (Studi Ideologi Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Implikasinya Terhadap Undang-Undang di Bidang Perekonomian) (Purnomosidi <i>et al.</i> , 2023)	(Purnomosidi <i>et al.</i> , 2023)	Disertasi	Univ. Muhamadiyah Surakarta	Oleh karena itu, ke depan, konstitusi ekonomi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 UUD 1945 harus berlandaskan pada ideologi Pancasila. Dengan landasan konseptual ini, Konstitusi Ekonomi Pancasila beroperasi pada tiga tingkat simultan. Secara ontologis, keberadaannya berawal dari Pancasila sebagai landasan idealnya, yang kemudian dielaborasi dalam UUD 1945 sebagai dasar konstitusionalnya. Secara epistemologis, ia berasal dari konsepsi paradigmatis yang menempatkan keadilan ekonomi dalam kerangka yang menyeimbangkan dimensi manusia sebagai individu dan makhluk sosial, menyeimbangkan hak dan kewajiban, dimensi fisik dan spiritual, dan memenuhi hak-hak sipil dan politik di samping hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Secara aksiologis, Konstitusi Ekonomi Pancasila muncul dari realitas empiris kesenjangan sosial dan ketidaksempurnaan pasar, yang bertujuan untuk mengatasinya melalui cita-cita gotong royong
4	MENUJU KEADILAN SOSIAL DALAM PENGELOLAAN SEKTOR HULU MIGAS (ANALISIS	(Misjuan and Dewi, 2022)	JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 9 No. 1 Tahun 2022	UM-Tapsel Press	Dari perspektif hak kontrol negara, skema bagi hasil sudah termasuk ketentuan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Jika sektor hulu minyak dan gas masih memerlukan investasi sebagai sumber pendapatan negara, penyesuaian terhadap skema bagi

	KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT DARI PRESPEKTIF PASAL 33 UUD 1945)				hasil diperlukan untuk menguntungkan pemerintah sekaligus memberikan kepastian bagi para investor
5	TINJAUAN HUKUM KEBIJAKAN INVESTASI DALAM PENGELOLAAN BLOK MAHAKAM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945	(Mishbahuddin , no date)	<i>Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. 1, Article 15.</i> Available at: https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/15	Univ Indoenesia - Elsevier	Sangat disayangkan ketika sektor-sektor ekonomi yang krusial dan mempengaruhi mata pencaharian banyak orang, seperti minyak dan gas, sebagian besar dikuasai oleh entitas asing yang terutama berorientasi pada pencarian keuntungan. Lebih khawatir lagi jika kontrol asing tersebut tidak didukung oleh instrumen hukum yang kuat yang mengutamakan kepentingan nasional. Blok Mahakam adalah salah satu sumber daya alam Indonesia yang penting dan berkontribusi besar terhadap pendapatan devisa negara. Namun, kontrak kerja di Blok Mahakam antara Pemerintah Indonesia dan pengusaha asing masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Dalam kasus Blok Mahakam, pengelolaannya telah dialihkan, namun masih terdapat anomali terkait hak partisipasi sebesar 39% yang masih dimiliki oleh mantan kontraktor, PT. Total E&P. Hak partisipasi ini terus menguntungkan Penanam Modal Asing di Indonesia. Diharapkan bahwa Negara akan berupaya untuk mengakomodasi hal ini sesuai dengan mandat yang ditetapkan dalam UUD 1945
6	Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/20021	(Magnar, Junaenah and Taufik, 2010)	<i>Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010</i>	Unpas	Keputusan ini memberikan interpretasi yang berbeda terhadap Pasal 33 UUD 1945, yang kemungkinan besar berdampak pada kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia. Sektor produksi yang vital bagi kehidupan masyarakat dan sumber daya alam ditempatkan dalam ranah hukum publik daripada hukum privat. Akibatnya, pengaturan hak kontrol negara menjadi representasi kolektif dari masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, bentuk pengelolaan bersama yang memungkinkan melalui koperasi dan delegasi negara atas pengelolaan barang publik kepada non-negara (koperasi), hanya dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen tindakan hukum yang satu arah

7	PRINSIP KOOPERATIF (KERJASAMA BERDASARKAN KEBERSAMAAN) SEBAGAI LANDASAN HUKUM PEMIKIRAN DEMOKRASI EKONOMI	(Eli Ruslina, 2019)	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/56872	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/56872	Konsep demokrasi ekonomi yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 tidak mengadopsi prinsip kooperatif berdasarkan kebersamaan sebagai dasar hukum demokrasi ekonomi
8	Identity and Role of State-Owned Enterprises for the People's Welfare Based on Article 33 of the Indonesian Constitution	(Putra and Lestari, 2020)		Atlantis Press	Identitas dan peran BUMN sebagai agen pembangunan, dengan dimensi bisnis dan sosial, menuntut agar BUMN mampu bertahan di era globalisasi di tengah tuntutan dari negara, masyarakat, dan pasar. Menghadapi hal ini, pemerintah perlu secara eksplisit memisahkan antara tindakan negara (pemerintah dan DPR) dan tindakan korporasi (BUMN) sehingga pengelolaan BUMN dapat berjalan secara profesional dan mampu mewujudkan tujuan negara
9	The Implementation of Oil and Gas Cooperation Contract Based on the Legal Principles of Pacta Sunt Servanda and The States Right to Control Land, Water and Natural Wealth Pursuant to Article 33 Paragraph (3) of The 1945 Constitution of The Republic of	(Ridwan, 2022)	<i>Delegagata</i>	Umsu	Pertanyaan hukum yang terkait adalah mengenai dampak peran Pemerintah sebagai pihak dalam perjanjian yang dapat mengubah undang-undang dan peraturan di sektor minyak dan gas, dengan tujuan untuk memastikan kepastian dan keadilan dalam kontrak-kontrak minyak dan gas untuk semua pihak yang terlibat. Selama fase implementasi, berbagai reformasi hukum berpotensi meningkatkan hubungan hukum antara pemerintah dan kontraktor minyak dan gas dalam eksekusi kontrak-kontrak minyak dan gas
10	Character and Disharmony of Legislation on Oil and Gas Sector in the Perspective of Article 33 of the 1945 Constitution	(Suparto and Admiral, 2021)	<i>Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Economic, Governance, ICOLEG 2021, 29-30 June 2021,</i>	ICOLEG 2021	Karakter legislasi dalam pengaturan pengelolaan minyak dan gas, dimulai dari Indische Mijnwet Stb 1899 No. 214 Jo. Stb 1906 No. 434, Undang-Undang No. 44/PRP/1960, Undang-Undang No. 8 Tahun 1971, dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001, mengalami variasi dari yang sesuai dengan semangat Pasal 33

<i>Semarang, Indonesia</i>	UUD 1945 hingga yang tidak. Perubahan ini dipengaruhi oleh tekanan internasional dan keberlanjutan kepentingan global dalam pengelolaan minyak dan gas di Indonesia. Upaya untuk menangani masalah ketidakharmonisan legislasi dan ketidaksesuaian dengan UUD 1945 bisa dilakukan dengan cara berikut: 1) Memperbaiki/mencabut beberapa pasal yang tidak sejalan atau seluruh pasal dari undang-undang dan peraturan terkait oleh lembaga yang berwenang membentuknya. 2) Mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (judicial review). 3) Mengimplementasikan prinsip hukum legislasi.
--------------------------------	---

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari uraian literatur yang ada di atas maka hasil penelitian di atas sebagai landasan dari artikel ilmiah ini dengan menjawab tujuan dari artikel ini dimana Pasal 33 Ayat 3 dan 4 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks hukum perdata internasional, prinsip-prinsip ini menuntut agar pengelolaan sumber daya alam, seperti minyak dan gas, dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Pengaturan kontrak-kontrak asing haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip ini untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam tidak hanya menguntungkan pihak asing, tetapi juga memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi rakyat Indonesia. Penilaian terhadap praktik pengelolaan lingkungan dan partisipasi masyarakat lokal menjadi penting untuk memastikan implementasi prinsip-prinsip Pasal 33 Ayat 3 dan 4 dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan menghormati hak-hak konstitusional rakyat.

Pembahasan dari artikel ini memberikan suatu perspektif bahwa implementasi Pasal 33 Ayat 3 dan 4 UUD 1945 dalam konteks kontrak-kontrak asing mengharuskan harmonisasi antara kepentingan ekonomi dengan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Ini menuntut regulasi yang kuat, transparansi dalam penegakan hukum, dan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip konstitusional ini diterapkan dengan baik demi kepentingan nasional yang lebih luas dan pembangunan yang berkelanjutan.

CONCLUSION

Implementasi prinsip-prinsip Pasal 33 Ayat 3 dan 4 UUD 1945 dalam kontrak-kontrak asing menuntut adanya harmonisasi antara kepentingan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Regulasi yang kuat, penegakan hukum yang transparan, serta partisipasi aktif masyarakat lokal menjadi kunci untuk mencapai tujuan konstitusional yang diinginkan dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

REFERENSI

- Akram, F., ul haq, M.A. and Raza, S. (2019) ‘A ROLE A CORPORATE GOVERNANCE AND FIRM’S ENVIRONMENTAL PERFORMANCE: A MODERATING ROLE OF INSTITUTIONAL REGULATIONS’, *International Journal of Management Studies* [Preprint]. Available at: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:226823950>.
- Arato, J. (2019) ‘The private law critique of international investment law’, *American Journal*

- of International Law*, 113(1), pp. 1–53.
- Bahoo, S., Alon, I. and Paltrinieri, A. (2020) ‘Corruption in international business: A review and research agenda’, *International Business Review*, 29(4), p. 101660.
- Basedow, J., Rühl, G. and Kono, T. (2022) ‘An economic analysis of private international law’.
- Berliandaldo, M. and Prasetyo, A. (2022) ‘Analisa dan Tinjauan Hukum atas Kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan Kendaraan Bermotor Listrik pada Sektor Pariwisata Indonesia’, *Sanskara Hukum dan HAM* [Preprint]. Available at: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:256609694>.
- Born, G. and Kalelioglu, C. (2021) ‘Choice-of-law agreements in international contracts’, *Ga. J. Int’l & Comp. L.*, 50, p. 44.
- Bungsu, A.P. (2023) ‘Segi-Segi Hukum Perdata Internasional Indonesia pada Perjanjian Jual Beli Saham dalam Proses Pengambilalihan Saham atas Perusahaan Indonesia oleh Perusahaan Asing.’, *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(3), pp. 2695–2708.
- Destyanto, T.Y.R. *et al.* (2022) ‘Civil Society and Civil Islam Implementation on Inter-religious Tolerance in Indonesia: A Phenomenological Study’, *Proceedings of the 2nd International Conference on Social Science, Humanity and Public Health (ICOSHIP 2021)* [Preprint]. Available at: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:247121703>.
- DiMatteo, L.A. (2021) *International business law and the legal environment: a transactional approach*. Routledge.
- Elli Ruslina, S.H. (no date) ‘PRINSIP KOOPERATIF (KERJASAMA BERDASARKAN KEBERSAMAAN) SEBAGAI LANDASAN HUKUM PEMIKIRAN DEMOKRASI EKONOMI’.
- Fuqoha, F. *et al.* (2023) ‘Harmonisasi Regulasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diantara Kesejahteraan Sosial dan Kepentingan Nasional’, *Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKa)* [Preprint]. Available at: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:257681171>.
- Ghauri, P., Strange, R. and Cooke, F.L. (2021) ‘Research on international business: The new realities’, *International Business Review*, 30(2), p. 101794.
- Handayani, I.G.A.K.R. (2018) ‘JUSTICIABILITY OF ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS IN INTERNATIONAL LAW AND ITS FUTURE IMPLEMENTATION IN INDONESIA’, *Yustisia Jurnal Hukum* [Preprint]. Available at: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:159313606>.
- Hetharie, Y. (2022) ‘Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing Melalui Perjanjian Pinjam Nama Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum Dalam Hukum Perdata Internasional’, *Balobe Law Journal*, 2(1), pp. 12–20.
- Hrp, A.R. and Thalib, A.A. (2019) ‘undang-undang dasar 1945’.
- Husein, S. *et al.* (2023) ‘Reconstruction of Civil Case Execution Regulation on the Implementation of *Uitvoerbaar Bij Voorraad* Based on Justice Value’, *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* [Preprint]. Available at: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:258399556>.
- Kustandi, C. and Yatimah, D. (2023) ‘Pemanfaatan Informasi Potensi Wisata berbasis Augmented Reality untuk Kelompok Sadar Wisata’, *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* [Preprint]. Available at: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:266115394>.
- Liu, Y., Failler, P. and Liu, Z. (2022) ‘Impact of Environmental Regulations on Energy Efficiency: A Case Study of China’s Air Pollution Prevention and Control Action Plan’, *Sustainability* [Preprint]. Available at: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:247379492>.
- Magnar, K., Junaenah, I. and Taufik, G.A. (no date) ‘Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945:(Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/20021’. Mishbahuddin, M. (no date) ‘TINJAUAN HUKUM KEBIJAKAN INVESTASI DALAM PENGELOLAAN BLOK MAHAKAM TERHADAP

- UNDANG-UNDANG DASAR 1945', " *Dharmasiswa*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(1), p. 15.
- Misjuan, Y.B.C. and Dewi, E.Y.R.S. (2022) 'Menuju Keadilan Sosial Dalam Pengelolaan Sektor Hulu Migas (Analisis Kontrak Bagi Hasil Gross Split Dari Prespektif Pasal 33 UUD 1945)', *Justitia: Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(1), pp. 98–112.
- Munim, Z.H. and Schramm, H.-J. (2018) 'The impacts of port infrastructure and logistics performance on economic growth: the mediating role of seaborne trade', *Journal of Shipping and Trade*, 3(1), pp. 1–19.
- OBE, M.E. (2015) 'International and Comparative Law Quarterly'. HeinOnline.
- Purnomosidi, A. *et al.* (2023) 'Ideologi Dan Konstitusi Ekonomi (Studi Ideologi Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Implikasinya Terhadap Undang-Undang di Bidang Perekonomian)'. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Putra, W.M. and Lestarini, R. (2020) 'Identity and Role of State-Owned Enterprises for the People's Welfare Based on Article 33 of the Indonesian Constitution', in *3rd International Conference on Law and Governance (ICLAVE 2019)*. Atlantis Press, pp. 331–337.
- Raza, S. *et al.* (2023) 'Advances in technology and utilization of natural resources for achieving carbon neutrality and a sustainable solution to neutral environment', *Environmental research*, 220, p. 115135.
- Ribeiro-Bidaoui, J. (2020) 'The International Obligation of the Uniform and Autonomous Interpretation of Private Law Conventions: Consequences for Domestic Courts and International Organisations', *Netherlands International Law Review*, 67(1), pp. 139–168.
- Ridwan, F.H. (2022) 'The Implementation of Oil and Gas Cooperation Contract Based on the Legal Principles of Pacta Sunt Servanda and The State's Right to Control Land, Water and Natural Wealth Pursuant to Article 33 Paragraph (3) of The 1945 Constitution of The Republic of', *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), pp. 52–65.
- Safitri, D. and Sumriyah (2023) 'MENGKALI KETIDAKPASTIAN HUKUM PADA PERJANJIAN STRATEGI BERFOKUS PADA MITIGASI RISIKO', *JURNAL ILMIAH RESEARCH STUDENT* [Preprint]. Available at: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:267641180>.
- Safitri, R. (2023) 'Pemberdayaan Masyarakat Lokal dalam Pengambilan Keputusan Lingkungan: Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam', *Journal of Mandalika Social Science* [Preprint]. Available at: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:266994869>.
- Shebubakar, A.N. (2023) 'Penafsiran konsep penguasaan negara dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Negara RI tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi'.
- Shuayb, A.S.S. *et al.* (2024) 'The impact of natural resources rent, renewable energy, and governance on the environmental sustainability—Evidence from resource-rich countries', *Natural Resources Forum* [Preprint]. Available at: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:269020908>.
- Suparto, S. and Admiral, A. (2021) 'Character and Disharmony of Legislation on Oil and Gas Sector in the Perspective of Article 33 of the 1945 Constitution', in *Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Economic, Governance, ICOLEG 2021, 29-30 June 2021, Semarang, Indonesia*.
- Symeonides, S.C. (2021) *Cross-border infringement of personality rights via the internet: A resolution of the Institute of International Law*. BRILL.
- Umar, M. *et al.* (2020) 'Environmental cost of natural resources utilization and economic growth: can China shift some burden through globalization for sustainable development?', *Sustainable Development*, 28(6), pp. 1678–1688.
- Wardhana, A.W. (2019) 'PENGEMBANGAN WARALABA SEBAGAI POLA KEMITRAAN BERASASKAN EFISIENSI BERKEADILAN DAN SISTEM

EKONOMI KERAKYATAN MENURUT PASAL 33 AYAT (4) UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945', in. Available at: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:204680927>.

- Xu, L. and Tan, J. (2020) 'Financial development, industrial structure and natural resource utilization efficiency in China', *Resources Policy*, 66, p. 101642.
- Yine (1998) 'Perlakuan Akuntansi Terhadap SWAP Contract Atas Pinjaman Dalam Mata Uang Asing Akibat Fluktuasi Kurs Pada PT. X Di Jakarta', in. Available at: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:170281361>.
- Yuda, T.D.M. (2023) 'The principle of legal certainty concerning the implementation of legalization according to the apostille convention viewed from an international civil law perspective', *International Journal of Latin Notary* [Preprint]. Available at: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:266120447>.
- Zhang, Y. and Dilanchiev, A. (2022) 'Economic recovery, industrial structure and natural resource utilization efficiency in China: effect on green economic recovery', *Resources Policy*, 79, p. 102958.